



**PROFIL**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN JEMBRANA**



**TAHUN 2020**

## **I. Gambaran Umum**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menyatakan bahwa, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b. Pelaksana kebijakan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

- c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- d. Pelaksana administrasi dinas dibidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- e. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana, terdiri dari :

- a. Kapala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
  - 1. Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
  - 2. Seksi Promosi Investasi; dan
  - 3. Seksi Pengendalian dan Pelaksanaan.
- d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi;
  - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
  - 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan
  - 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.

- e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan, membawahi :
  - 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
  - 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
  - 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
- f. Bidang Hubungan Industrial, membawahi :
  - a. Seksi Persyaratan Kesejahteraan Pekerja; dan
  - b. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja.
- g. Bidang Penempatan, Pelatihan, Produktivitas dan Transmigrasi, membawahi :
  - 1. Seksi Pelatihan, Produktivitas dan Transmigrasi; dan
  - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas

## **II. Visi dan Misi.**

Sesuai Visi Kabupaten Jembrana yaitu ***“Terwujudnya Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya menuju Masyarakat Jembrana yang sejahtera”***, dengan Misi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional berdaya saing yang unggul.
- 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan sumber daya alam.

3. Melakukan berbagai inovasi, dan jiwa *entrepreneur* masyarakat berbasis *research* dengan pemanfaatan kemajuan IPTEK.

Sebagaimana disebutkan didalam misi Pemerintah Kabupaten Jembrana, yaitu misi pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional berdaya saing yang unggul, dan misi ketiga yaitu melakukan berbagai inovasi, dan jiwa *enterpreneur* masyarakat berbasis *research* dengan pemanfaatan kemajuan IPTEK. Sejalan dengan misi tersebut, maka sasaran strategis yang ingin dicapai dalam mewujudkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional berdaya saing yang unggul adalah dengan peningkatan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan dan meningkatkan sumber daya manusia yang professional, jujur dan akuntabel melalui optimalisasi keberadaan dan fungsi Balai Latihan Kerja.

Dalam hal misi Kabupaten Jembrana untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan sumber daya alam, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana berupaya merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan investasi dengan meningkatkan pelayanan prima melalui pelayanan terpadu satu pintu sehingga dapat meningkatkan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan baik perizinan maupun non perizinan.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana secara konsisten dan terus

menerus akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada, melalui berbagai program pelatihan kerja, pengadaan bursa kerja, perlindungan ketenagakerjaan, promosi investasi serta dengan peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat. Dengan demikian diharapkan akan mampu menciptakan sumber daya manusia yang handal, berdaya saing, mampu berinovasi serta memiliki jiwa *entrepreneur* sehingga dapat mengoptimalisaikan sumber daya yang ada menuju masyarakat Jembrana yang sejahtera.

### **III. Area Perubahan.**

Sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana juga melakukan perubahan pada beberapa area strategis antara lain;

#### 1. Bidang Organisasi.

Tujuan perubahan pada bidang organisasi adalah menciptakan organisasi tepat fungsi yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui optimalisasi tugas pokok dan fungsi masing – masing secara lebih terukur.

#### 2. Bidang Tata laksana.

Tujuan perubahan pada bidang tata laksana adalah menciptakan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,

terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dengan menyusun SOP (*Standard Operating Procedure*) pada masing-masing bidang sebagai dasar acuan pelaksanaan tugas.

3. Bidang Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan perubahan pada bidang perundang-undangan diarahkan dalam penyusunan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif. Dalam penerapan dan pelaksanaannya setiap regulasi yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana dikoreksi dan diterbitkan melalui sistem satu pintu yaitu Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana, sehingga diharapkan setiap regulasi yang dibuat tidak tumpang tindih dan sesuai dengan tata naskah.

4. Bidang Sumber Daya Aparatur.

Untuk meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur yang berintegritas, berkinerja tinggi dan sejahtera, maka diwujudkan dengan cara penerapan disiplin, pemahaman makna pelayanan maupun melaksanakan koordinasi dan visitasi ke daerah lain sebagai bagian pembelajaran.

5. Bidang Pengawasan.

Pengawasan dilakukan dengan melaksanakan secara rutin apel pagi mulai masuk kerja dengan penyampaian kegiatan hari bersangkutan oleh pemimpin apel, penggunaan absensi elektronik maupun absen manual, menerapkan Sistem

Pengawasan Internal (SPI) dan secara rutin mengadakan rapat staf untuk evaluasi dan program kerja.

6. Bidang Akuntabilitas.

Pada bidang akuntabilitas telah menggunakan Sistem keuangan yang berbasis *acrue!*, sistem keuangan online dalam bentuk SIMDA KEUANGAN dan penataan aset online dalam wujud SIMDA BMD. Hal ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi.

7. Bidang Pelayanan Publik.

Sebagai ujung tombak dalam hal pelayanan publik maka Peningkatan pelayanan tidak hanya difokuskan pada regulasi saja akan tetapi juga mengarah pada kenyamanan lingkungan, keramahan pelayanan dan fasilitas informasi yang memadai. Tersedianya ruang tunggu yang nyaman, akses internet gratis, LED TV dan informasi online seluruh program yang dapat dilihat pada website Pemerintah Kabupaten Jembrana ; [www.jembranakab.go.id](http://www.jembranakab.go.id).

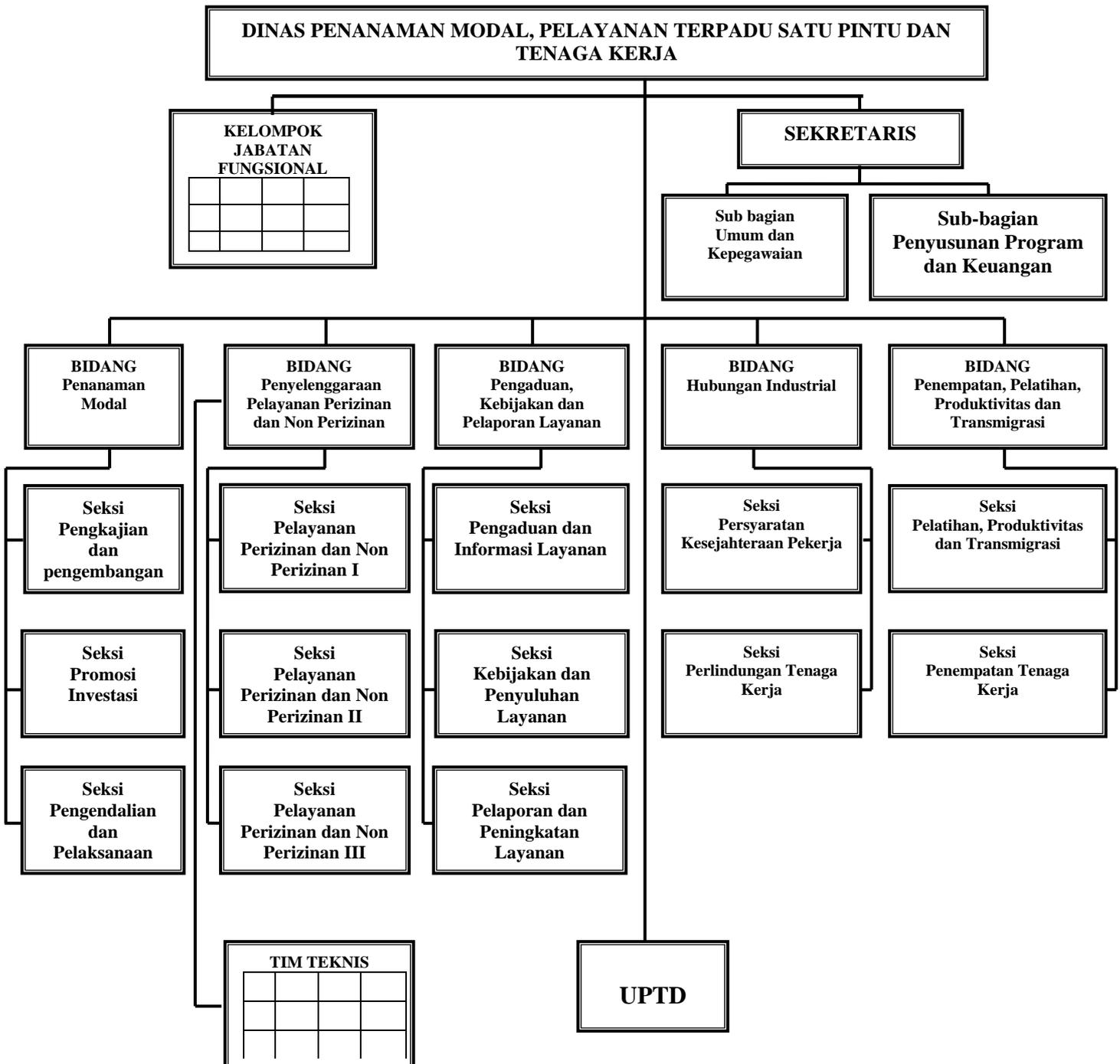
8. Bidang Mindset dan Cultural Set Aparatur.

Menciptakan budaya organisasi yang kondusif dengan mengembangkan kearifan lokal, partisipasi dan kerjasama seluruh staf sebagai dasar pijakan dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Mengubah budaya dari dilayani menjadi melayani, hal ini akan dapat mendorong integritas serta kinerja organisasi.

### 3.1 Bagan Struktur Organisasi

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
 NOMOR : 47 TAHUN 2016  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
 PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

#### Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana



### 3.2. Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana sampai dengan akhir Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Sumber daya Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana berdasarkan jenis kelamin seperti pada Tabel 3.1.

**Tabel.3.1**

**JUMLAH SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN JEMBRANA  
BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

No	JENIS KELAMIN	JUMLAH, PERSENTASE					
		ASN		KONTRAK		TOTAL	
1	Laki-laki	31	57.41%	6	66.67%	37	58.73%
2	Perempuan	23	42.59%	3	33.33%	26	41.23%
Jumlah total		54	100.00%	9	100.00%	63	100.00%

- a. Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana berdasarkan tingkat pendidikan seperti pada Tabel 3.4

**Tabel 3.4**  
**JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN TENAGA KERJA**  
**BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
		JMLH	%	JMLH	%	JMLH	%
1	SD	0	0 %	0	0 %	0	0 %
2	SMP	0	0 %	2	3.12%	2	3.12 %
3	SMA/Sederajat	5	7.81 %	10	15.62 %	15	30.64 %
4	DI	0	0 %	0	0 %	0	0 %
5	DII	1	1.56 %	0	0 %	1	1.56 %
6	DIII	1	1.56 %	1	1.56 %	2	3.12 %
7	DIV	0	0 %	0	0 %	0	0 %
8	S1	28	43.75 %	9	14.06 %	37	48.39 %
9	S2	5	8.06 %	2	4.84 %	8	12.92 %
10	S3	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>40</b>	<b>60.71 %</b>	<b>24</b>	<b>39.29%</b>	<b>64</b>	<b>100.00%</b>

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Sebagai perwujudan dari kebijakan strategis dalam rangka mencapai tujuan organisasi, maka disusun langkah-langkah operasional yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana, maka langkah-langkah operasional dijabarkan dalam program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang mengacu pada :

1. Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur dan menggerakkan Sumber Daya Aparatur melaksanakan tugas dan fungsi agar berperan aktif dalam program pembangunan;
2. Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang, jasa dan pelatihan yang diperlukan dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- e. Penyediaan Makanan dan Minuman
- f. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah
- g. Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- b. Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari–Hari Tertentu
- b. Penyebarluasan Peraturan ASN
- c. Pelaksanaan Absensi secara elektronik
- d. Pelaksanaan Apel Pagi Sebelum Kegiatan
- e. Pengisian Buku Register Pegawai Keluar Jam Kerja

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Penugasan Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis
- b. Penugasan Untuk Mengadakan Konsultasi dan Koordinasi
- c. Pelaksanaan Rapat Staf

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyusunan Laporan Keuangan

**6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**

- a. Pelayanan Kesejahteraan PNS
- b. Proses Penanganan Pelanggaran Disiplin Dalam Lingkup Dinas

**IV. Hasil Kegiatan Pada Masing-masing Bidang**

Sebagai tindak lanjut dari uraian program diatas, maka kegiatannya dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan, Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana.

**4.1 Kegiatan Bidang Penanaman Modal**

Bidang Penanaman Modal melaksanakan kegiatan di antaranya adalah :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, yaitu:
  - a. Peningkatan terwujudnya kerjasama strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah;
  - b. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
  - c. Penyelenggaraan pameran investasi.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, yaitu dengan:

- a. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi.

Adapun jumlah Investasi/Penanaman Modal di Kabupaten Jembrana selama tahun 2019 baik dari sector primer, sekunder maupun tersier, sebagai berikut :

- a. Rencana PMDN dan PMA :

- Jumlah Pengusaha sebanyak 335 unit
- Nilai Investasi sebesar Rp. 150 000.000.000,- ( *seratus lima puluh miliar rupiah.* )
- Penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.600 orang sedangkan,

- b. Realisasi PMDN dan PMA

- Jumlah Pengusaha sebanyak 551 unit (164,48% dari target)
- Nilai Investasi sebesar Rp. 631.798.191.219,- ( *enam ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus Sembilan belas rupiah* ) 421,20% dari target
- Penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.391 orang, sebesar 211,9% dari yang ditargetkan.

## **4.2. Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

Kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (P3NP) meliputi :

1. Penerimaan berkas permohonan perizinan dan Non Perizinan;
2. Penjadwalan dan Pemeriksaan Lapangan terhadap permohonan izin yang mewajibkan pemeriksaan lapangan;
3. Penerbitan/penolakan Izin dan Non Izin

Setelah melalui mekanisme pemeriksaan lapangan, berkas permohonan perizinan dibuatkan kajian oleh tim teknis dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik / *Online Single Submission (OSS)*, maka perizinan berusaha diterbitkan oleh Lembaga OSS secara elektronik yang mana Lembaga ini menerbitkan izin secara online. Pemohon dapat melakukan secara mandiri dengan terhubung kepada Lembaga OSS dengan pemenuhan komitmen bagi yang dipersyaratkan. Kewenangan Dinas (PTSP) adalah memproses lebih lanjut

pemenuhan komitmen yang diajukan pemohon, agar izin dapat berlaku efektif.

Berdasarkan kajian OPD teknis, Dinas PMPTSPTK melalui Bidang P3NP memproses surat persetujuan ataupun menolaknya. Berikut daftar perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Bidang P3NP selama tahun 2019;

<b>NO</b>	<b>NAMA PERIZINAN</b>	<b>SURAT PER-SETUJUAN</b>	<b>TOTAL IZIN TERBIT TAHUN 2019</b>
1	Pendaftaran Penanaman Modal		
2	Izin Usaha Perkebunan (IUP)		
3	Izin Usaha Peternakan	<b>3</b>	<b>3</b>
4	Pendaftaran Usaha Peternakan		
5	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	<b>37</b>	<b>37</b>
6	Izin Usaha Perikanan (IUP)	<b>6</b>	<b>6</b>
7	Izin Usaha Industri (IUI)	<b>9</b>	<b>9</b>
8	Izin Perluasan Usaha Industri		
9	Izin Usaha Kawasan Industri		
10	Izin Perluasan Kawasan Industri		
11	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	<b>114</b>	<b>114</b>
12	Tanda Daftar Gudang (TDG)		
13	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang		
14	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	<b>9</b>	<b>9</b>
15	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	<b>5</b>	<b>5</b>
16	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta		

17	Izin Koperasi Simpan Pinjam		
18	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)		
19	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam		
20	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam		
21	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam		
22	Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras		
23	Izin Pemotongan Ternak, Penanganan Daging serta hasil olahannya		
24	Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)		
25	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan		
26	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP)		
27	Surat Izin Paramedik Veteriner Kebuntingan (SIPP PKb)		
28	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Retribusi		
29	Surat Izin Veteriner (SIVET)		
30	Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		
31	Tanda Daftar Izin Usaha Perikanan (TD-IUP)		<b>3</b>
32	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol		<b>6</b>
33	Izin Lingkungan		<b>163</b>
34	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil		<b>4</b>
35	Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)		<b>2</b>

36	Izin Mendirikan Bangunan		<b>206</b>
37	Izin Lokasi		<b>194</b>
38	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)		
39	Izin Tempat Usaha Pengolahan Sampah		
40	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)		<b>103</b>
41	Surat Keterangan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan		
42	Surat Keterangan Tata Ruang (SKTR)		<b>717</b>
43	Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK)		<b>96</b>
44	Pengesahan Lay-Out Plan		<b>109</b>
45	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)		
46	Surat Izin Praktik Refraksionis Optometris (SIP RO)		<b>2</b>
47	SIP Teknisi Kardiovaskuler		
48	Izin Apotek	<b>5</b>	<b>12</b>
49	Izin Optikal		<b>2</b>
50	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)		<b>14</b>
51	Surat Izin Praktik Fisioterapi		<b>7</b>
52	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian SIP TTK)		<b>15</b>
53	Surat Izin Praktik Penata Anestesi		
54	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGZ)		<b>8</b>
55	Surat Izin Praktik Radiografer		<b>1</b>
56	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)		<b>10</b>
57	Surat Izin Praktik Elektro Medis (SIP-E)		<b>1</b>
58	Izin Praktik Perorangan Dokter/Dokter Gigi (SIPD)		<b>137</b>
59	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)		<b>119</b>

60	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)		<b>119</b>
61	Surat Izin Praktik Perekam Medis		<b>1</b>
62	Surat Izin Praktik Ahli Tenaga Lab Medis (SIP-ATLM)		<b>12</b>
63	Izin Toko Obat		
64	Izin Salon Kecantikan		
65	Izin Pelayanan Kesehatan SPA Tradisional		
66	Sertifikat Prod. Pangan Industri RT (SPP-IRT)		<b>24</b>
67	Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas C dan D		
68	Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C dan D	<b>1</b>	<b>1</b>
69	Izin Operasional Klinik		
70	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pertama		
71	Izin Toko Alat Kesehatan		
72	Izin Pendidikan Anak Usia Dini	<b>1</b>	<b>1</b>
73	Izin Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat (kursus)		<b>5</b>
74	Izin Operasional Puskesmas		
75	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian		<b>2</b>
76	Izin Tukang Gigi		
77	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi		<b>3</b>
78	Sertifikat Laik Sehat		<b>6</b>
79	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
80	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit		
81	Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)		

82	Izin Pengumpulan Uang dan Barang		
83	Tanda Daftar Panti		
84	Tanda Daftar Yayasan		<b>1</b>
85	<b>JUMLAH</b>	<b>140</b>	<b>2.304</b>

Selama tahun 2019 Dinas PMPTSP telah menerbitkan sebanyak 2.889 izin dan Non Izin, dan telah mengembalikan sebanyak 9 (sembilan) berkas permohonan izin yang tidak mendapatkan rekomendasi dari OPD yang berwenang. Selain tersebut diatas Bidang P3NP juga melayani penerbitan non perizinan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA NON PERIZINAN</b>	<b>JUMLAH PERMOHONAN MASUK TAHUN 2019</b>
1	Rekomendasi Pemakaian Gedung Mendopo Kesari	<b>36</b>
2	Kartu Tanda Kepemilikan	<b>162</b>
3	Kartu Pengawasan	<b>48</b>
4	Kartu Tanda Pencari Kerja	<b>650</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>896</b>

Yang dimaksud Kartu Tanda Kepemilikan dan Kartu Pengawasan dalam hal ini adalah terkait kendaraan angkutan, baik orang maupun barang. Khusus untuk Kartu Pencari Kerja (Pencaker) yang biasa disebut kartu kuning. Selama tahun 2019, dengan uraian seperti pada tabel;

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PENCARI KERJA TAHUN 2018			
		L	P	(L + P)	
1	S. D.	3	8	11	
2	S.M.P.	4	30	52	
3	S.M.A / SETINGKAT SMA	174	174	348	
4	PERGURUAN TINGGI	D I , DII / AKTA I, AKTA II	98	19	117
		D III / SARMUD / AKTA III	8	11	19
		S 1 / SARJANA	41	45	86
		S2	2	1	3
5.	<b>JUMLAH</b>	<b>327</b>	<b>280</b>	<b>618</b>	

### 3. Reklame

Pendataan papan reklame, baliho dan sebagainya yang berkaitan dengan iklan suatu produk di Kabupaten Jembrana dilaksanakan oleh Bidang P3NP namun tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan. Selama tahun 2019 PTSP mendata sebanyak 585 (lima ratus delapan puluh lima) papan reklame dengan jumlah retribusi sebesar Rp. 338.918.900,- (*tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah*) yang dibayarkan langsung oleh pemohon ke kas daerah Kabupaten Jembrana.

#### **4.3. Kegiatan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan**

Kegiatan di bidang Pengaduan, kebijakan dan Pelaporan antara lain :

### 1. Seksi Pengaduan dan Layanan Informasi

Seksi Pengaduan dan layanan Informasi mempunyai tugas dan fungsi memberikan layanan informasi terkait penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di wilayah Kabupaten Jembrana serta menerima pengaduan masyarakat terkait kendala dalam proses perizinan yang mana selama tahun 2019 terdapat 2 kasus pengaduan dan semua telah ditindaklanjuti. Sebagai indikator pelaksanaan tugas fungsi, bidang PKP meminta masyarakat yang datang untuk mengisi angket indeks kepuasan masyarakat. Selama tahun 2019 hasil penilaian 261 orang masyarakat memberikan respon positif, sehingga mutu pelayanan masuk kategori A yaitu sangat baik.

### 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

Selama periode tahun 2019, Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan telah menyelenggarakan sosialisasi/penyuluhan di 5 (lima) kecamatan dengan menghadirkan 200 orang peserta dalam setiap kegiatan dari berbagai kalangan masyarakat

### 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Pelayanan

Seksi Pelaporan dan Peningkatan Pelayanan memenuhi 40 (empat puluh) permintaan data dari pihak eksternal dinas dan membuat sebanyak 12 (dua belas) laporan selama tahun 2019.

#### **4.4. Kegiatan Bidang Hubungan Industrial**

Bidang Hubungan Industrial selama tahun 2019 dalam rangka Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan melaksanakan kegiatan antara lain :

1. Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
2. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan;
3. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kegiatan hubungan industrial sebagai indikator kegiatan berikutnya.

#### **4.5. Kegiatan Bidang Penempatan, Pelatihan, Produktivitas dan Transmigrasi (Pentalattastrans)**

Bidang Pentalattastrans selama tahun 2019 melaksanakan kegiatan :

1. Mengesahkan Kartu Pencari Kerja yang diterbitkan Bidang P3NP sebagai bukti keabsahan;
2. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program peningkatan kesempatan kerja. Di Kabupaten Jemberana terdapat 23 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan tersebar di 5 kecamatan, sedangkan melaksanakan kemitraan dengan Bursa Kerja Khusus

(BKK) yaitu lembaga yang dibentuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta. Sampai saat ini di Kabupaten Jember terdapat 7 BKK, pada 5 sekolah kejuruan negeri dan 2 sekolah kejuruan swasta.

#### **4.6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Balai Latihan Kerja (BLK) oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah selama tahun 2019 menyelenggarakan berbagai macam pelatihan seperti : pengolahan hasil pertanian, garmen, meubelair, kecantikan dan tata rias, spa, teknik las, instalasi listrik, operator computer, bahasa inggris, anyaman lidi, pembuatan kue, tata laksana rumah tangga dan perawatan lansia (*care giver*). Adapun biaya pelatihan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk kegiatan pelatihan dengan sumber dana APBD, sebagai berikut :

No.	Nama Program	Waktu	Jumlah Peserta	Lokasi	Ket.
1	Juru las I SMAW (MMAW)	11 Maret s/d 15 April 2019	20 org	Desa Kaliakah	Teknik Las
2	Tata Rias Kecantikan I	11 Maret s/d 02 April 2019	20 org	LKP Parahiyangan	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
3	Tata Rias Kecantikan II	11 Maret s/d 02 April 2019	20 org	LPK 'SEKARTAJI'	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
4	Asisten Pembuat Pakaian	11 Maret s/d 15 April 2019	20 org	UPT BLK JEMBRANA	Tata Busana
5	Pembuatan Desain Grafis	15 April s/d 24 Mei 2019	20 org	UPT BLK JEMBRANA	Teknologi Informasi dan Komunikasi
6	Anyaman tempurung kelapa	22 April s/d 17 Mei 2019	20 org	Desa Berangbang	Aneka Kejuruan
7	Caregiver (Penjaga Lansia Jepang)	22 April s/d 29 Mei 2019	20 org	SMKN 4 Negara	Bisnis Manajemen
8	Pembuatan Kue	07 Mei s/d 25 Mei 2019	20 org	Desa Yehembang	Processing Hasil Pertanian
9	Pembuatan Kue II	07 s/d 23 Okt 2019	20 org	Desa Kaliakah	Processing Hasil Pertanian
10	Tata Rias Kecantikan III	07 Okt s/d 11 Nov 2019	20 org	LPK 'MAHAVIDYA'	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
11	Perakitan Komputer	07 Okt/d 11 Nov 2019	20 org	UPTD BLK Jembrana	Teknologi Informasi dan Komunikasi
12	Mengerjakan finishing dengan	07 Okt s/d 11 Nov 2019	20 org	Desa Sarikuning	Bangunan
13	Pembuatan Kue III	24 Okt s/d 11 Nov 2019	20 org	Desa Tegal Badeng Timur	Processing Hasil Pertanian

Sedangkan kegiatan pelatihan dengan sumber dana APBN, sebagai berikut :

**LAPORAN KEGIATAN APBN 2019 UPTD BLK JEMBRANA**

NO	NAMA PROGRAM	WAKTU	JUMLAH PESERTA	LOKASI	KEJURUAN
<b>NON BOARDING</b>					
1	Practical Office I	14 Pebs/d 25 Maret 2019	16 org	UPTD BLK JEMBRANA	Teknologi Informasi dan Komunikasi
2	Juru Las 1 SMAW	11 Maret s/d 06 Mei 2019	16 org	UPTD BLK JEMBRANA	Teknik Las
3	Servis Sepeda Motor Konvensional	15 April s/d 24 Mei 2019	16 org	UPTD BLK JEMBRANA	Otomotif
4	Asisten Operator Costume Made Wanita II	22 April s/d 14 Juni 2019	16 org	UPTD BLK JEMBRANA	Garmen Apparel
5	Mengerjakan Finishing Teknik Semprot	18 Juni s/d 31 Juli 2019	16 org	UPTD BLK JEMBRANA	Bangunan
6	Pemasangan Listrik Bangunan Sederhana	25 Juni s/d 09 Agustus 2019	16 org	UPTD BLK JEMBRANA	Listrik
7	Practical Office II	18 Juni s/d 22 Juli 2019	16 org	UPTD BLK JEMBRANA	Teknologi Informasi dan Komunikasi
8	Asisten Operator Costume Made Wanita III	25 Juni s/d 09 Agus 2019	16 org	UPTD BLK JEMBRANA	Garmen Apparel
9	Juru Las 1 SMAW Angkatan II	25 Juni s/d 22 Agus 2019	16 org	UPTD BLK JEMBRANA	Teknik Las
10	Asisten Operator Costume Made Wanita IV	10 Sept s/d 19 Okt 2019	16 org	UPTD BLK JEMBRANA	Garmen Apparel
11	Asisten Operator Costume Made Wanita V	10 Septs/d 19 Okt2019	16 org	UPTD BLK JEMBRANA	Garmen Apparel
12	Asisten Operator Costume Made Wanita VI	15 Okt s/d 25 Nov2019	16 org	UPTD BLK JEMBRANA	Garmen Apparel

<b>MOBILE TRAINING UNIT (MTU)</b>					
1	Asisten Operator Costume Made Wanita	14 Feb s/d 13 Mar 2019	16 org	Desa Nusasari	Garmen Apparel
2	Pembuat Roti dan Kue	14 Feb s/d 13 Mar 2019	16 org	Desa Candikusuma	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian
3	Penata Rambut I	14 Feb s/d 13 Mar 2019	16 org	LPK Ayu Bagus	Tata Kecantikan
4	Penata Rambut II	14 Feb s/d 13 Mar 2019	16 org	LPK Esther (Tegalcangkring)	Tata Kecantikan
5	Pembuat Roti dan Kue II	08 April s/d 04 Mei 2019	16 org	Desa Candikusuma	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian
6	Pembuat Roti dan Kue III	18 Juni s/d 10 Juli 2019	16 org	Desa Candikusuma	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian
7	Pengolahan Ikan I	15 Juli s/d 12 Agus 2019	16 org	Desa Tegal Badeng Barat	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian
8	Pengolahan Ikan II	21 Agus s/d 12 Sept 2019	16 org	Desa Pengambengan	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian
9	Spa Therapys	10 Sept s/d 02 Okt 2019	16 org	LPK "Mahavidya"	Pariwisata
10	Tata Rias Kecantikan	10 Sept s/d 02 Okt 2019	16 org	LPK "Puspita"	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut

## **V. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2019**

Pada tahun 2019 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana mendapat anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 2.849.763.069,00 (*dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam puluh sembilan rupiah*) untuk mendanai 11 (sebelas) program dengan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan. Dari dana yang dianggarkan tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.623.787.173,00 (*dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah*) yaitu sebesar 92,07% dari pagu anggaran. Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dapat lihat pada tabel.

**Tabel 5.1**

**REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

**KABUPATEN JEMBRANA**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

**BULAN : DESEMBER 2019**

No	NAMA OPD DAN NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG APBD (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)			% FISIK	% KEU	SISA PAGU (Rp)	KET	
				s/d BULAN LALU	BULAN INI	s/d BULAN INI					
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9	10 (4-7)	11	
1	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	39	2.849.763.069,00	2.051.926.192,00	571.860.981,00	2.623.787.173,00	92,07	92,07	225.975.896,00		
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8	675.800.565,00	558.074.886,00	56.459.000,00	614.533.886,00	90,93	90,93	61.266.679,00		
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.250.000,00	4.092.000,00	0,00	4.092.000,00	77,94	77,94	1.158.000,00	
		2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	67.541.850,00	49.256.850,00	17.725.000,00	66.981.850,00	100,00	99,17	560.000,00	
		3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.464.700,00	23.412.200,00	0,00	23.412.200,00	95,70	95,70	1.052.500,00	
		4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	100,00	100,00	0,00	
		5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	149.120.000,00	136.871.450,00	8.600.000,00	145.471.450,00	97,55	97,55	3.648.550,00	

		6	Penyediaan Makanan dan Minuman	38.680.000,00	28.083.000,00	3.410.000,00	31.493.000,00	81,42	81,42	7.187.000,00	
		7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	351.782.200,00	283.066.986,00	24.724.000,00	307.790.986,00	87,49	87,49	43.991.214,00	
		8	Penyediaan Upakara dan Upacara Keagamaan	34.561.815,00	28.892.400,00	2.000.000,00	30.892.400,00	89,38	89,38	3.669.415,00	
<b>2</b>	<b>PROGRAM: PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>3</b>		<b>247.550.904,00</b>	<b>208.002.471,00</b>	<b>21.975.549,00</b>	<b>229.978.020,00</b>	<b>92,90</b>	<b>92,90</b>	<b>17.572.884,00</b>	
		1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	217.050.904,00	188.802.471,00	14.725.549,00	203.528.020,00	93,77	93,77	13.522.884,00	
		2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	9.500.000,00	3.200.000,00	4.750.000,00	7.950.000,00	83,68	83,68	1.550.000,00	
		3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	21.000.000,00	16.000.000,00	2.500.000,00	18.500.000,00	88,10	88,10	2.500.000,00	
<b>3</b>	<b>PROGRAM: PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>2</b>		<b>35.600.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>35.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00	100,00	100,00	0,00	
		2	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
<b>4</b>	<b>PROGRAM: PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA</b>	<b>2</b>		<b>19.070.600,00</b>	<b>4.875.600,00</b>	<b>10.525.000,00</b>	<b>15.400.600,00</b>	<b>80,76</b>	<b>80,76</b>	<b>3.670.000,00</b>	
		1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11.140.600,00	4.875.600,00	5.974.000,00	10.849.600,00	97,39	97,39	291.000,00	
		2	Penyusunan Laporan Keuangan	7.930.000,00	0,00	4.551.000,00	4.551.000,00	88,80	57,39	3.379.000,00	

<b>6</b>	<b>PROGRAM: PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>	<b>3</b>		<b>115.086.200,00</b>	<b>99.247.309,00</b>	<b>9.568.000,00</b>	<b>108.815.309,00</b>	<b>94,55</b>	<b>94,55</b>	<b>6.270.891,00</b>	
		1	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	21.055.600,00	17.255.600,00	0,00	17.255.600,00	81,95	81,95	3.800.000,00	
		2	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	20.904.000,00	10.569.000,00	9.568.000,00	20.137.000,00	96,33	96,33	767.000,00	
		3	Penyelenggaraan pameran investasi	73.126.600,00	71.422.709,00	0,00	71.422.709,00	97,67	97,67	1.703.891,00	
<b>5</b>	<b>PROGRAM: PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA</b>	<b>5</b>		<b>797.380.900,00</b>	<b>481.169.450,00</b>	<b>246.916.350,00</b>	<b>728.085.800,00</b>	<b>91,31</b>	<b>91,31</b>	<b>69.295.100,00</b>	
		1	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	27.500.000,00	27.200.000,00	0,00	27.200.000,00	98,91	98,91	300.000,00	
		2	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja	251.500.000,00	161.004.650,00	84.483.750,00	245.488.400,00	97,61	97,61	6.011.600,00	
		3	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	484.105.600,00	288.805.800,00	148.044.600,00	436.850.400,00	90,24	90,24	47.255.200,00	
		4	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK	32.500.000,00	4.159.000,00	12.620.000,00	16.779.000,00	51,63	51,63	15.721.000,00	
		5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1.775.300,00	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00	99,59	99,59	7.300,00	
<b>7</b>	<b>PROGRAM: PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI</b>	<b>1</b>		<b>32.942.400,00</b>	<b>30.171.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.171.860,00</b>	<b>91,59</b>	<b>91,59</b>	<b>2.770.540,00</b>	
		1	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	32.942.400,00	30.171.860,00	0,00	30.171.860,00	91,59	91,59	2.770.540,00	

<b>8</b>	<b>PROGRAM: PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA</b>	<b>5</b>		<b>449.257.600,00</b>	<b>322.406.896,00</b>	<b>98.692.382,00</b>	<b>421.099.278,00</b>	<b>93,73</b>	<b>93,73</b>	<b>28.158.322,00</b>	
		1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	161.741.000,00	65.613.200,00	90.248.382,00	155.861.582,00	96,36	96,36	5.879.418,00	
		2	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	137.202.200,00	125.221.296,00	5.200.000,00	130.421.296,00	95,06	95,06	6.780.904,00	
		3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	8.935.400,00	2.013.400,00	3.244.000,00	5.257.400,00	58,84	58,84	3.678.000,00	
		4	Bursa tenaga kerja	127.850.000,00	120.380.000,00	0,00	120.380.000,00	94,16	94,16	7.470.000,00	
		5	Pembinaan lembaga pelatihan kerja	13.529.000,00	9.179.000,00	0,00	9.179.000,00	67,85	67,85	4.350.000,00	
<b>9</b>	<b>PROGRAM: PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN</b>	<b>3</b>		<b>45.665.200,00</b>	<b>36.328.120,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>44.128.120,00</b>	<b>96,63</b>	<b>96,63</b>	<b>1.537.080,00</b>	
		1	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	13.582.800,00	13.017.260,00	0,00	13.017.260,00	95,84	95,84	565.540,00	
		2	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	23.604.000,00	18.017.460,00	5.300.000,00	23.317.460,00	98,79	98,79	286.540,00	
		3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	8.478.400,00	5.293.400,00	2.500.000,00	7.793.400,00	91,92	91,92	685.000,00	
<b>10</b>	<b>PROGRAM: TRANSMIGRASI REGIONAL</b>	<b>1</b>		<b>39.225.500,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>30.260.700,00</b>	<b>31.040.700,00</b>	<b>79,13</b>	<b>79,13</b>	<b>8.184.800,00</b>	
		1	Penyuluhan Transmigrasi Regional	39.225.500,00	780.000,00	30.260.700,00	31.040.700,00	79,13	79,13	8.184.800,00	

11	<b>PROGRAM: PENINGKATAN PELAYANAN UMUM PERIJINAN</b>	<b>6</b>		<b>392.183.200,00</b>	<b>294.869.600,00</b>	<b>70.064.000,00</b>	<b>364.933.600,00</b>	<b>93,05</b>	<b>93,05</b>	<b>27.249.600,00</b>	
		1	Peningkatan Pelayanan Perijinan	136.524.800,00	55.113.800,00	56.284.000,00	111.397.800,00	81,60	81,60	25.127.000,00	
		2	Peningkatan Penertiban Reklame	29.825.600,00	29.660.600,00	0,00	29.660.600,00	99,45	99,45	165.000,00	
		3	Peningkatan Pendataan Perijinan	14.365.300,00	11.406.700,00	2.790.000,00	14.196.700,00	98,83	98,83	168.600,00	
		4	Peningkatan Verifikasi Perijinan	163.539.500,00	153.969.500,00	9.320.000,00	163.289.500,00	99,85	99,85	250.000,00	
		5	Pelayanan pengaduan masyarakat	37.180.000,00	35.740.000,00	750.000,00	36.490.000,00	98,14	98,14	690.000,00	
		6	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	10.748.000,00	8.979.000,00	920.000,00	9.899.000,00	92,10	92,10	849.000,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>39</b>		<b>2.849.763.069,00</b>	<b>2.051.926.192,00</b>	<b>571.860.981,00</b>	<b>2.623.787.173,00</b>	<b>92,07</b>	<b>92,07</b>	<b>225.975.896,00</b>	

**DOKUMENTASI**





Pelaksanaan Cek Lapangan









